

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan dunia usaha telah menimbulkan persaingan yang semakin tajam, demikian halnya dengan industri pelayanan kesehatan sebagai dampak kemajuan teknologi bidang kesehatan menuntut pembiayaan dan investasi yang sangat mahal, sementara itu kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat semakin terbatas. Oleh karena itu perlu memberikan otonomi dengan ruang gerak yang lebih leluasa bagi rumah sakit. Salah satunya dengan memberikan status Badan Layanan Umum pada rumah sakit.

Istilah Badan Layanan Umum muncul setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditetapkan sesuai dengan semangat reformasi dan otonomi daerah. Sesuai Pasal 1 ayat (23) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 adalah

bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuan Badan Layanan Umum ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Menurut Mahmudi (2016:202), apabila dikelompokkan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain.
2. BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (kapet).
3. BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

Rumah sakit merupakan salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan ujung tombak dalam pembangunan masyarakat. Namun, tak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari manajemen maupun operasional sangat di pengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu

antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien (Mahmud&Sugiono 2014:2). Dan juga pada saat ini, biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintah karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu (Aji, 2017:2).

Dalam rangka upaya tersebut perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun dalam pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanam di rumah sakit dapat dipergunakan secara optimal, dan rumah sakit dapat beroperasi lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain dalam pengelolaan sumber daya, Badan Layanan Umum rumah sakit juga dituntut untuk dapat menyajikan data dan informasi yang akurat, tersaji secara tepat waktu bagi kepentingan pihak-pihak yang memerlukan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan beban, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan Badan Layanan Umum rumah sakit disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu laporan keuangan Badan Layanan Umum rumah sakit juga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pengambilan

keputusan. Dalam menyusun laporan keuangannya, rumah sakit yang sudah berstatus Badan Layanan Umum harus menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010. Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi Badan Layanan Umum Rumah Sakit untuk menyusun laporan keuangannya sehingga dapat meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan Badan Layanan Umum rumah sakit.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/810/RSUD/2011 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungailiat telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dan untuk pelaporan keuangannya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungailiat harus mengacu pada Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 karena pedoman ini dijadikan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan bagi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Berdasarkan KMK RI Nomor 1981 Tahun 2010 (Studi Kasus Di RSUD Kota Sungailiat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada penyajian laporan keuangan RSUD Kota Sungailiat?
2. Apakah penyajian laporan keuangan RSUD Kota Sungailiat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010?

1.3 Batasan Masalah

Luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada dan supaya pembahasan masalah lebih terfokus dan spesifik maka dibutuhkan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah yang akan dibahas, yaitu membatasi pada pembahasan tentang kesesuaian penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungailiat dengan menggunakan ketentuan Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit yaitu Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No.1981/Menkes/SK/XII/2010.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 pada pelaporan keuangan RSUD Kota Sungailiat.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan dalam penyajian laporan keuangan RSUD Kota Sungailiat dengan Pedoman Akuntansi Layanan Umum Rumah Sakit Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010.

1.5 Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi siapapun khususnya bagi akademisi serta menambah wawasan dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik terutama yang berkaitan dengan pelaporan keuangan entitas nirlaba khususnya mengenai pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan pengembangan penelitian dibidang yang sama di masa mendatang.

b. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungailiat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaporan keuangan RSUD Kota Sungailiat.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sungailiat untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam pelaporan keuangannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas. Sehingga penulisan penelitian ini dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan sehingga dapat menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun penelitian ini di bagi menjadi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain seperti buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya, penelitian terdahulu serta Rerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian yang digunakan serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat, serta mendeskripsikan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini mendeskripsikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dilakukan dalam penelitian ini.